

PROGRAM KERJA PEMBINAAN JFA TAHUN 2025

OT.04/LPP-56/JF/04/2025
TANGGAL 18 FEBRUARI 2025



KATA PENGANTAR

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) merupakan Unit Kerja BPKP yang menjalankan peran BPKP sebagai instansi Pembina JFA. Pusbin JFA bertugas melaksanakan pembinaan kepada seluruh auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Pembinaan terhadap JFA bertujuan untuk mewujudkan auditor yang profesional, kompeten dan dapat meningkatkan kualitas pengawasan APIP.

Pusbin JFA merumuskan kerangka pembinaan melalui 4 (empat) peran pembinaan JFA terintegrasi, yakni (1) Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembinaan JFA, (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Auditor Intern Pemerintah, (3) Pembinaan Profesi Audit Intern Pemerintah, dan (4) Pelayanan JFA. Selain itu, Pusbin JFA mengemban amanah untuk mengoordinasikan Agenda Prioritas Pengawasan terkait Peningkatan Kapabilitas APIP dan merumuskan Kebijakan Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern.

Tugas strategis tersebut merupakan momentum yang akan menjadi faktor pendorong (*driving factor*) dan kesempatan (*opportunity*) bagi peningkatan kinerja Pusbin JFA. Peran Pusbin tak lagi terbatas pada pengelolaan JFA, melainkan diperluas ke pembinaan terhadap area kelembagaan APIP dan perumusan kebijakan pembinaan kapabilitas pengawasan.

Pusbin JFA menyusun program kerja pembinaan yang memuat strategi, kebijakan, dan kegiatan di awal tahun untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja. Dalam perumusan perencanaan ini, dilakukan identifikasi isu strategis terhadap aspek pembinaan JFA dan risiko yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dirumuskan strategi dan rencana aksi untuk memitigasi risiko dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang lebih terkelola dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Program Kerja Pembinaan JFA tahun 2025 merupakan bentuk komitmen dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja.

Proses penyusunan program kerja melibatkan peran aktif dari setiap elemen Pusbin JFA. Berbagai masukan, ide, dan aspirasi pegawai menjadi landasan utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh. Keterlibatan seluruh pegawai tersebut juga dimaksudkan untuk membangun rasa saling memiliki dan keterikatan yang akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Program Kerja Pembinaan JFA tahun 2025 ini merupakan acuan dan panduan bagi pelaksanaan tugas Pusbin JFA.



Jakarta, 18 Februari 2025

Kepala Pusat Pembinaan JFA,

Iwan Agung Prasetyo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Daftar Isi	02
Pendahuluan	02
Isu Strategis	02
Sasaran dan Indikator Kinerja <i>Outcome</i> Tahun 2025	03
Pelaksanaan Peran Dalam Pencapaian Indikator Kinerja	04
Target Output Dalam Pelaksanaan Peran Pusat Pembinaan JFA	06
Peran 1	08
Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembinaan JFA	
Fokus	09
Rencana Kegiatan Tahun 2025	11
Peran 2	14
Penyelenggara Uji Kompetensi JFA	
Fokus	15
Rencana Kegiatan Tahun 2025	17
Peran 3	20
Pembinaan Profesi Audit Intern	
Fokus	21
Rencana Kegiatan Tahun 2025	22
Peran 4	24
Fasilitasi Jabatan Fungsional Auditor	
Fokus	25
Rencana Kegiatan Tahun 2025	27
Enabler	29
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	
Fokus	30
Rencana Kegiatan Tahun 2025	32
Lampiran	39

PENDAHULUAN

Program kerja Pusbin JFA Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas Pusbin JFA dalam mengagendakan kegiatan rencana kerja yang terarah, terpadu dan sistematis pada tahun 2025. Program Kerja ini digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pembinaan JFA. Dalam menyusun program kerja ini, Pusbin JFA mempertimbangkan beberapa isu strategis yang memberikan arah dan fokus atas program yang akan diagendakan. Beberapa isu strategis tersebut antara lain:

ISU STRATEGIS



Kesiapan APIP Mengawal Pemerintahan Baru

Nahkoda baru Pemerintah Pusat membawa arah pembangunan yang juga baru. Berbagai program strategis dirancang dan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Tak hanya di level pusat, Kepala Daerah hasil pilkada serentak seluruh Indonesia, juga dilantik dan aktif per Februari 2025. Tentu menjadi tantangan bagi APIP K/L/D untuk mengawal program strategis yang diagendakan.



Komitmen Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan *piloting* uji kompetensi pada September 2024 lalu merupakan upaya memastikan kompetensi setiap auditor yang menduduki jenjang jabatan tertentu. Komitmen atas pengembangan kompetensi auditor perlu melibatkan seluruh pihak, mulai dari para pimpinan APIP, BPKP, dan PFA. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Bersama antara Ketua KPK, Mendagri, dan BPKP Nomor: 11 Tahun 2024 dan Nomor: 700.1/3013/SJ dan Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan APIP Pemerintah Daerah.



Mandat Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern

Tak hanya dalam pembinaan JFA, Pusbin JFA mendapatkan mandat sejak Tahun 2024 untuk mengoordinasikan Agenda Prioritas Pengawasan: Peningkatan Kapabilitas APIP K/L/D. Dalam rangka penguatan kapabilitas APIP, Pusbin JFA mengembangkan kebijakan pembinaan kapabilitas pengawasan intern sebagai bentuk implementasi salah satu fungsi BPKP yang diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2023



Efisiensi Anggaran

Pemerintah melakukan efisiensi Anggaran APBN melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pusbin JFA perlu melakukan upaya-upaya penghematan anggaran dengan mengurangi belanja operasional dan non operasional yang terdiri dari belanja operasional perkantoran dan perjalanan dinas. Upaya penghematan tersebut diharapkan tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan oleh Pusbin JFA.



Dinamika Pengelolaan JFA dan Peran Organisasi Profesi

Pembentukan kabinet baru pemerintahan berimplikasi terhadap kebutuhan pembentukan dan penataan APIP serta pemenuhan JFA. Penataan JFA akan sangat krusial di tahun 2025. Selain itu, fokus peningkatan peran organisasi profesi AAIPi akan terus dikawal untuk mendorong peningkatan kompetensi, pemenuhan standar, dan kode etik, sehingga peningkatan kualitas auditor semakin baik.



Mewujudkan Layanan JFA yang prima

Komitmen terhadap pelayanan kepada stakeholder selalu menjadi prioritas Pusbin JFA. Upaya peningkatan layanan terus menerus dikembangkan, mulai dari penataan tata kelola pelayanan, pemenuhan SOP, hingga penyediaan sumber daya yang memadai.

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA *OUTCOME* TAHUN 2025

Indikator kinerja *outcome* tahun 2025 disusun berdasarkan rancangan target kinerja *outcome* dalam periode Rencana Strategis Pusbin JFA periode 2025-2029. Target kinerja tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

01		02			
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pusbin JFA			
Optimal	Tingkat Kebermanfaatan Hasil Pembinaan Pusbin JFA	80	Indeks Kepuasan Layanan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	95	Nilai IKPA Unit Kerja
42%	Persentase APIP dengan JFA Cukup Secara Kualitas	85	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Efektif	Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Staker
		70%	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	50%	Persentase Penurunan Tingkat Keterjadian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
				85,72	Nilai SAKIP Unit Kerja

Indikator kinerja *outcome* berupa Tingkat Kebermanfaatan Hasil Pembinaan Pusbin JFA ditetapkan adalah **Optimal**. Indikator kinerja tersebut diukur dari dua sub indikator. Sub indikator pertama persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti. Sub indikator kedua adalah Persentase APIP dengan hasil penilaian kapabilitas APIP skor minimal 3 pada elemen "Peran dan Layanan" dan "Pengelolaan SDM".

Indikator kinerja *outcome* berikutnya adalah Persentase APIP dengan JFA Cukup Secara Kualitas ditetapkan sebesar **42%**. Indeks tersebut merupakan Jumlah APIP dengan Persentase JFA yang memiliki kompetensi untuk melakukan peran dan layanan di level 3 minimal 25% dibandingkan dengan populasi K/L/D (270 K/L/D).

PELAKSANAAN PERAN DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja *outcome* di atas, Pusbin JFA menjabarkan rencana kegiatan berdasarkan peran yang diemban oleh Pusbin JFA. Pelaksanaan peran Pusbin JFA didasarkan pada pelaksanaan 19 tugas instansi Pembina JFA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, penjabaran peran juga didasarkan pada tugas dan fungsi Pusbin JFA yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Peraturan BPKP nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPKP Nomor 3 tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan BPKP.

diimplementasikan dalam peran

PERAN 1: PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN JFA

1. Menyusun pedoman formasi JF
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF
3. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja JF
4. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang tugas JF
5. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan JF tersebut
7. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan

diimplementasikan dalam peran

PERAN 2: PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

8. Menyusun standar kompetensi JF
9. Menyusun kurikulum pelatihan JF
10. Menyelenggarakan pelatihan JF
11. Menyelenggarakan uji kompetensi JF
12. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF
13. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara
14. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan

diimplementasikan dalam peran

PERAN 3: PEMBINAAN PROFESI JFA

15. Memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF
16. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF
17. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF

diimplementasikan dalam peran

PERAN 4: FASILITASI LAYANAN JFA

18. Mengembangkan sistem informasi JF
19. Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional

Pelaksanaan Peran Pusbin JFA yang mendukung tercapainya Indikator kinerja dapat dipetakan dalam matriks berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja outcome	Pelaksanaan Peran	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	Tingkat Kebermanfaatan Hasil Pembinaan Pusbin JFA	Perumusan Kebijakan & Strategi Pembinaan	Enabler
	Persentase APIP dengan JFA cukup secara kualitas	Penyelenggara Uji Kompetensi	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusbin JFA	Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA	
		Fasilitasi Jabatan Fungsional Auditor	
Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja		Enabler Pusbin JFA	
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)			
Skor IKPA Unit Kerja			
Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker			
Persentase Penurunan Tingkat Keterjadian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK			
Nilai SAKIP Unit Kerja			

TARGET OUTPUT DALAM PELAKSANAAN PERAN PUSAT PEMBINAAN JFA

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Pusbin JFA menetapkan target output yang dijabarkan sebagai berikut:

01

PERAN PERUMUSAN KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBINAAN JFA

8

Peraturan/Draf Peraturan

19

Laporan

02

PERAN PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI JFA

2

Laporan

5

Paket Soal

2.500

Jumlah Peserta
Ujikom & USABK

200

Jumlah Peserta
CCAE

50%

% ketepatan waktu
penerbitan sertifikat
Auditor jenjang
Terampil, Pertama,
Muda, Madya dan
Utama

03

PERAN PEMBINAAN PROFESI AUDIT INTERN

17

Laporan

04

PERAN FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

1

Laporan Nasional

2

Laporan Semester

300

Jumlah Formasi JFA

500

Jumlah PNS yang diusulkan
untuk diangkat dalam JFA

1.000

Jumlah Tiket Konsultasi

05

PERAN ENABLER PUSAT PEMBINAAN JFA

36

Laporan

5

Aplikasi

85,72

Skor Pengelolaan SAKIP

85

Skor Pembangunan ZI

80

Skor Pengukuran Indeks
Kepuasan Layanan Pusbin JFA

70%

% Efektivitas Pengendalian
Intern Unit Kerja

95

Skor IKPA Pusbin JFA

90

Skor Pengelolaan BMN
Pusbin JFA

Efektif

Predikat Laporan PIPK

PERAN 1

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN JFA



Peran pertama Pusbin JFA adalah Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembinaan JFA. Dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan JFA, perlu mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab JFA. Perumusan kebijakan dan strategi pembinaan JFA juga sangat tergantung pada regulasi terkait, yang mencakup peraturan yang mengatur tentang ASN secara umum maupun Jabatan Fungsional secara khusus. Pengembangan kebijakan dan strategi JFA memerlukan komitmen dari berbagai pihak baik BPKP, APIP K/L/D maupun AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menentukan arah dan panduan bagi JFA. Dalam perumusan kebijakan, harus dilakukan dengan baik, implementatif, dan solutif, sehingga perlu strategi yang tepat dalam melakukan pembinaan pengelolaan JFA agar memberikan *outcome* bagi organisasi. Untuk itu, diperlukan fokus dalam perumusan strategi.

FOKUS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN JFA



Penyelesaian Draf Regulasi/Kebijakan

Fokus peran perumusan kebijakan dan strategi pembinaan yang pertama yaitu penyelesaian draf regulasi/kebijakan. Terdapat enam draf kebijakan yang belum terselesaikan di Tahun 2024 dan menjadi prioritas di tahun ini. Target penyelesaian bukan menjadi satu-satunya pertimbangan melainkan dari sisi kemanfaatan. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan karena memiliki dampak luas terhadap pada stakeholder.

Implementasi Regulasi/Kebijakan

Kebijakan tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan. Oleh sebab itu, fokus berikutnya yaitu implementasi terhadap regulasi/kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka implementasi atas regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi atas pelaksanaannya.



Penguatan Auditor BPKP

Penguatan Auditor BPKP akan menjadi fokus pada program pembinaan Tahun 2025. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyiapan Keputusan Kepala terkait Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) khusus auditor BPKP. Penguatan ini akan memberikan keunggulan bagi auditor BPKP.

Penetapan dan Implementasi Kebijakan Cetak Biru Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (Binwasin)

Fokus terakhir pada peran perumusan kebijakan dan strategi pembinaan JFA yaitu penetapan dan implementasi kebijakan cetak biru pembinaan kapabilitas pengawasan internal pemerintah (Binwasin). Cetak biru Binwasin harus diselesaikan di Tahun 2025 sesuai dengan mandat yang telah diberikan melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.



Pelaksanaan peran Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembinaan mendukung pencapaian Sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor”. Di mana dalam sasaran ini, indikator kinerja outcome yang akan dicapai adalah Tingkat Kebermanfaatan Hasil Pembinaan Pusbin JFA. Dalam pelaksanaan peran ini, Pusbin JFA menetapkan indikator kinerja output yang dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KINERJA		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		
INDIKATOR KINERJA OUTCOME		
Tingkat Kebermanfaatan Hasil Pembinaan Pusbin JFA		
PELAKSANAAN PERAN		
Perumusan Kebijakan & Strategi Pembinaan		
INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	JUMLAH
Penyusunan Regulasi/Kebijakan JFA	Peraturan/Draf Peraturan	8
Sosialisasi JFA	Laporan	6
Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern	Laporan	1
Evaluasi Penerapan JFA	Laporan	4
Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	Laporan	2
Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi strategis	Laporan	2
Rekomendasi Pembinaan JFA	Laporan	4

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025

Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan peran pertama terdiri dari tujuh kegiatan dengan output atas masing-masing kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Penyusunan Regulasi/Kebijakan JFA

Penyusunan regulasi JFA meliputi pengaturan terhadap definisi tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan standar kinerja yang harus dipenuhi oleh JFA. Penyusunan regulasi pembinaan JFA menjadi kunci utama dalam pengelolaan JFA untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor intern pemerintah dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JFA.



Target Output Tahun 2025

8 Peraturan/Draf Peraturan

- Peraturan BPKP tentang Pelatihan Fungsional Auditor bagi Pelaksana Pengawasan Intern di TNI, POLRI, dan Pegawai Non ASN di Badan Hukum Lainnya .
- Keputusan Kepala BPKP terkait SKJ BPKP
- Revisi Permenpan 48 Tahun 2022 tentang JFA
- Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) dan Pedoman penilaian
- Ketentuan Formasi JFA
- Ketentuan tentang Pola Hubungan JFA dan Asosiasi
- Pedoman Pengembangan Kompetensi (Bangkom)
- Kebijakan *Blueprint* Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah(Binwasin)

Sosialisasi JFA



Internalisasi atas kebijakan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tentang regulasi telah tersosialisasikan dengan baik dan pihak-pihak yang terkait dapat mengimplementasikan berbagai regulasi JFA dengan pemahaman yang baik.

Target Output Tahun 2025

6 Laporan

Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pengembangan Kebijakan Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan nilai pengawasan APIP. Selain itu, kerangka kerja terpadu memberikan panduan dalam kontribusi peran pada audit intern pemerintah lintas masa dan dapat membimbing komitmen pembinaan JFA Nasional dalam mengakomodasi dinamika isu perubahan dan isu masa depan.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Evaluasi Penerapan JFA



Evaluasi penerapan JFA dimaksudkan untuk mengidentifikasi implementasi atas regulasi JFA pada APIP K/L/D. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil, dampak, faktor pendukung dan kendala yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi perumusan kebijakan dan regulasi JFA berikutnya.

Pusbin JFA akan melaksanakan evaluasi tematik dengan mengidentifikasi isu spesifik untuk dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pengelolaan JFA dan meningkatkan kualitas pengelolaan JFA.

Target Output Tahun 2025

4 Laporan

Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pembuatan sistem pengembangan kompetensi JFA diperlukan sebagai wadah dalam mengelola, mengidentifikasi dan monitoring pengembangan kompetensi JFA. Monitoring atas pelaksanaan pengembangan kompetensi diperlukan untuk melihat peningkatan kompetensi serta perbaikan yang dapat dilakukan.

Target Output Tahun 2025

2 Laporan



Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Strategis



Rekomendasi pembinaan JFA diarahkan untuk bersifat strategis, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait yang perlu menindaklanjuti rekomendasi, serta pemantauan dan koordinasi atas tindak lanjut rekomendasi pembinaan JFA. Tindak lanjut atas rekomendasi merupakan indikator kemanfaatan hasil pembinaan yang dilakukan Pusbin JFA.

Target Output Tahun 2025

2 Laporan

Rekomendasi Pembinaan JFA

Rekomendasi pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dilakukan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, profesional, dan berintegritas.

Target Output Tahun 2025

4 Laporan



PERAN 2 PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI JFA



Dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional auditor, Pusbin JFA memiliki peran penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional auditor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.

FOKUS PERAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR INTERN PEMERINTAH



Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Fokus peran pertama pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan uji kompetensi. Uji kompetensi yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024, akan menggantikan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK). Metode USABK hanya akan dilakukan kepada peserta USABK yang tidak lulus pada periode sebelumnya dan akan melakukan ujian ulang.

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ujian Kompetensi

Fokus berikutnya yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan ujian kompetensi. Kualitas dimaksud tercermin dari persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat uji kompetensi JFA.



Penyiapan Perangkat Uji Kompetensi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan uji kompetensi, perlu disiapkan perangkat uji kompetensi berupa penyediaan bank soal uji kompetensi. Penyediaan bank soal tersebut dilakukan bagi seluruh jenjang jabatan baik auditor pertama, auditor muda, auditor madya dan auditor utama serta jenjang auditor keterampilan.



Peran kedua, yakni Penyelenggaraan Uji Kompetensi, mendukung pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor” dengan Indikator kinerja outcome Kepala Pusbin JFA yaitu “Persentase APIP dengan JFA cukup secara kualitas”. Indikator kinerja output atas peran penyelenggaraan uji kompetensi, terdiri dari enam indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN KINERJA		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		
INDIKATOR KINERJA OUTCOME		
Persentase APIP dengan JFA cukup secara kualitas		
PELAKSANAAN PERAN		
Penyelenggara Uji Kompetensi		
INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	JUMLAH
Menyusun Analisis Potensi Pelaksanaan Uji Kompetensi	Laporan	2
Pengembangan Perangkat Uji Kompetensi Jenjang Auditor Madya, Utama	Paket Soal	2
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Auditor Madya, Utama	Jumlah Peserta Ujikom & USABK	500
	% ketepatan waktu penerbitan sertifikat	50%
Pelaksanaan Uji Kompetensi CGCAE	Jumlah Peserta CGCAE	200
Pengembangan Perangkat Uji Kompetensi Jenjang Auditor Pertama, Muda	Paket Soal	3
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Auditor Pertama, Muda	Jumlah Peserta Ujikom & USABK	2.000
	% ketepatan waktu penerbitan sertifikat	50%

Untuk melaksanakan peran penyelenggaraan uji kompetensi, dilakukan melalui berbagai kegiatan mulai dari penyusunan analisis potensi pelaksanaan uji kompetensi hingga penerbitan kompetensi. Penjabaran lebih lanjut atas kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Menyusun Analisis Potensi Pelaksanaan Uji Kompetensi

Menyusun analisis potensi pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan strategi implementasi yang efektif, memastikan kesiapan teknis dan administratif, serta memitigasi kendala yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Target Output Tahun 2025

2 Laporan



Pengembangan Perangkat Uji Kompetensi Jenjang Auditor Madya, Utama



Pusbin JFA menyusun pengembangan perangkat uji kompetensi sebagai pengejawantahan dari Perban BPKP Nomor 5 Tahun 2023 dalam proses merancang dan menciptakan alat evaluasi untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam memenuhi standar kompetensi JFA. Hasil uji kompetensi JFA diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan handal sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan (*continuous professional development*).

Target Output Tahun 2025

2 Paket Soal

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Auditor Madya, Utama

Pelaksanaan uji kompetensi JFA melibatkan proses implementasi dan evaluasi kinerja auditor yang mengikuti uji kompetensi. Selain itu, uji kompetensi JFA bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan auditor sesuai dengan standar jabatan fungsional tersebut khususnya untuk Auditor Madya dan Auditor Utama, memberikan gambaran yang objektif terhadap tingkat kompetensinya. Pada tahun 2024, pelaksanaan Ujian Sertifikasi dan Uji Kompetensi JFA dilakukan dengan penyesuaian pada masa transisi.



Target Output Tahun 2025

500 Jumlah Peserta
Ujikom & USABK

50% % ketepatan waktu
penerbitan sertifikat

Pelaksanaan Uji Kompetensi CGCAE

Pelaksanaan uji kompetensi *Certified Government Chief Audit Executive* memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi bagi para pimpinan atau calon pimpinan APIP.



Target Output Tahun 2025

200 Jumlah Peserta
CGCAE

Pengembangan Perangkat Uji Kompetensi Jenjang Auditor Pertama, Muda

Pengembangan perangkat uji kompetensi jenjang Auditor Pertama dan Auditor Muda merupakan proses penyusunan instrumen evaluasi yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan, bertujuan untuk memastikan ketersediaan perangkat uji yang valid, reliabel, dan sesuai kebutuhan, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menilai kemampuan dan kelayakan auditor pada masing-masing jenjang secara objektif dan akuntabel.



Target Output Tahun 2025

3 Paket Soal

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Auditor Pertama, Muda

Pelaksanaan pengembangan perangkat uji kompetensi adalah untuk memastikan tersedianya alat ukur yang memadai dalam menilai kompetensi Auditor Pertama dan Auditor Muda, sehingga mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Target Output Tahun 2025

2.000

Jumlah Peserta
Ujikom & USABK

50%

% ketepatan waktu
penerbitan sertifikat

PERAN 3 PEMBINAAN PROFESI AUDIT INTERN



FOKUS PERAN PEMBINAAN PROFESI AUDIT INTERN

Sebagai upaya untuk memperkuat profesionalisme kelembagaan APIP, Pusat Pembinaan (Pusbin) JFA turut serta aktif memfasilitasi penguatan profesi JFA. Tak hanya aktif secara langsung membina JFA, Pusbin JFA juga memfasilitasi organisasi profesi AAIP. Dua fokus ini menjadi prioritas pembinaan JFA.



Pembinaan Organisasi Profesi

Fokus yang pertama yaitu pembinaan organisasi profesi. Fokus ini dilakukan melalui kegiatan fasilitas organisasi profesi JFA dan fasilitas Komite AAIP.

Pembinaan JFA melalui Bimbingan Teknis

Pusbin JFA melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan JFA sebagai panduan teknis untuk membimbing pengelola dalam mengelola aspek-aspek jabatan fungsional auditor.



Pelaksanaan peran Pembinaan Profesi Audit Intern ini merupakan dukungan atas pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor”. Penjabaran lebih lanjut atas kegiatan yang mendukung peran ini sebagai berikut:

SASARAN KINERJA

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA

PELAKSANAAN PERAN

Pembinaan Profesi Audit Intern

INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	JUMLAH
Fasilitasi Organisasi Profesi JFA	Laporan	4
Pengisian konten ELMS	Laporan	1
Koordinasi Pelaksanaan TSE	Laporan	1
Forum Komunikasi Pembinaan JFA	Laporan	1
Bimtek Pengelolaan JFA	Laporan	10

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk melaksanakan peran pembinaan profesi audit intern, dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan profesi JFA dan fasilitasi atas organisasi profesi AAIP. Penjabaran lebih lanjut atas kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Fasilitasi Organisasi Profesi JFA



Pusbin JFA melakukan Fasilitasi Organisasi Profesi JFA guna memberikan dukungan terhadap organisasi profesi terkait jabatan fungsional auditor yang mencakup penyelenggaraan seminar, workshop, dan forum diskusi untuk mengembangkan standar, pedoman, dan praktik terbaik.

Target Output Tahun 2025

4 Laporan

Pengisian Konten ELMS

Pusbin JFA melakukan fasilitasi organisasi profesi JFA berupa Fasilitasi Pengembangan ELMS.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Koordinasi Pelaksanaan TSE



Koordinasi pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal (TSE) dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan mutu audit internal terlaksana secara efektif dan sesuai standar yang berlaku, melalui sinergi antarunit kerja dan pihak terkait guna mendukung peningkatan kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas hasil audit.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan

Forum Komunikasi Pembinaan JFA

Forum Komunikasi Pembinaan JFA sebagai wadah/platform untuk komunikasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi antara pembina JFA, auditor, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah membahas isu-isu terkini, perubahan regulasi, strategi pembinaan, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait JFA. Forum ini mendukung pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan pemahaman yang lebih baik terkait jabatan fungsional auditor.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Bimtek Pengelolaan JFA

Pusbin JFA melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan JFA sebagai panduan teknis untuk membimbing pengelola dalam mengelola aspek-aspek jabatan fungsional auditor, seperti perubahan regulasi, strategi pengembangan kompetensi, penyusunan kurikulum, dan pemetaan kebutuhan kompetensi. Tujuannya adalah memastikan pengelola dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memastikan auditor memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Target Output Tahun 2025

10 Laporan



PERAN 4 FASILITASI LAYANAN JFA



FOKUS PERAN FASILITASI LAYANAN JFA

Sebagai unit kerja yang menjalankan peran BPKP dalam pembinaan JFA, Pusbin JFA bersikap proaktif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pengelolaan JFA. Upaya ini diwujudkan dalam peran keempat yakni Peran Fasilitasi Layanan JFA. Dalam melaksanakan peran ini, dilakukan melalui dua fokus yakni perbaikan kualitas layanan dan dukungan sistem informasi yang mumpuni.



Perbaikan Kualitas Layanan

Memberikan layanan prima *stakeholders* merupakan prioritas Pusbin JFA. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas layanan selalu menjadi fokus bagi Pusbin JFA. Beberapa layanan yang diberikan oleh Pusbin JFA adalah layanan verifikasi dan validasi formasi JFA, layanan pengangkatan ke dalam JFA, serta layanan konsultasi JFA.

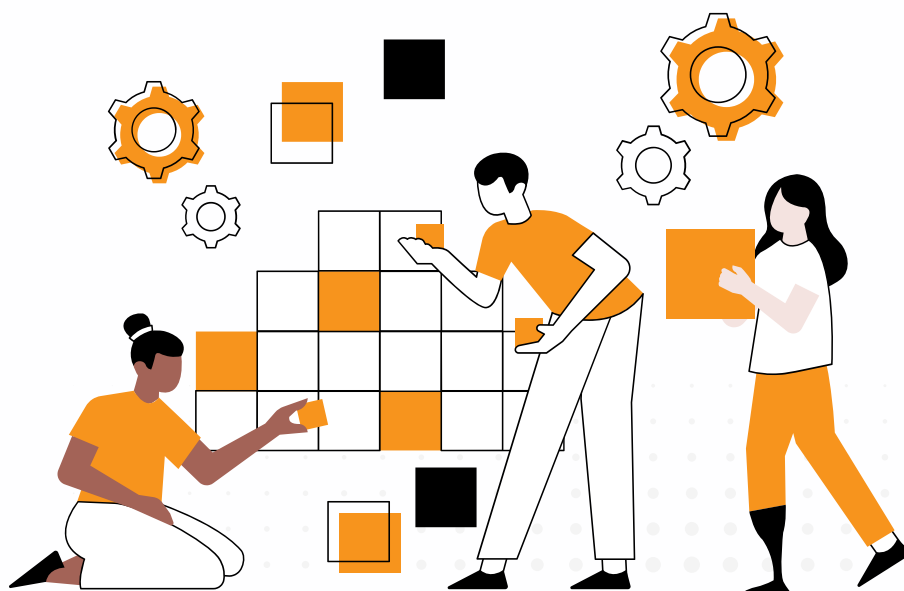
Pengembangan Aplikasi dan Database Auditor

Sistem Informasi JFA perlu dikembangkan dan dimaintain agar dapat menyediakan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Upaya perbaikan terus-menerus juga diperlukan untuk menghindari risiko pada aplikasi *out of date* ataupun keamanan sistem (*cyber security*).



Pelaksanaan peran Fasilitasi Layanan JFA merupakan dukungan atas pencapaian sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor” dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA. Penjabaran lebih lanjut atas kegiatan yang mendukung peran ini sebagai berikut:

SASARAN KINERJA		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		
INDIKATOR KINERJA OUTCOME		
Indeks Kepuasan Layanan Pusbin JFA		
PELAKSANAAN PERAN		
Fasilitasi Jabatan Fungsional Auditor		
INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	JUMLAH
Layanan Verval Formasi JFA	Jumlah Formasi JFA	300
Layanan Pengangkatan ke dalam JFA	Jumlah PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JFA	500
Monitoring Pengangkatan ke dalam JFA	Laporan Nasional	1
Koordinasi Pembinaan Karier JFA	Laporan Semester	2
Layanan Konsultasi JFA	Jumlah tiket konsultasi	1000



RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk melaksanakan peran Fasilitasi Layanan JFA, dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan JFA. Penjabaran lebih lanjut atas kegiatan layanan yang diberikan oleh Pusbin JFA diuraikan sebagai berikut:

Layanan Verval Formasi JFA

Layanan verval formasi JFA perlu diperbaiki terutama ditambahkan fitur hasil penetapan formasi dari MenPAN RB pada aplikasi SIBIJAK agar proses persetujuan pengangkatan ke dalam JFA khususnya Auditor Ahli Utama tidak terhambat.

Target Output Tahun 2025

300 Formasi JFA



Layanan Pengangkatan ke Dalam JFA



Pergantian admin SIBIJAK sering menghambat pengajuan usulan pengangkatan ke dalam JFA sehingga Pusbin JFA perlu memberikan informasi secara aktif kepada stakeholder (APIP) mengenai hal tersebut agar tidak terjadi keterlambatan proses persetujuan pengangkatan ke dalam JF.

Target Output Tahun 2025

500 PNS diusulkan untuk diangkat dalam JFA

Monitoring Pengangkatan ke Dalam JFA

Melakukan pemantauan dan *monitoring* terhadap pelaksanaan pengangkatan perpindahan dalam JFA dan pengangkatan pertama.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Koordinasi Pembinaan Karir JFA

Koordinasi dengan Unit APIP terkait pengelola Kepegawaian dalam rangka meningkatkan pembinaan karir JFA

Target Output Tahun 2025

2 Laporan



Layanan Konsultasi JFA

Kemudahan APIP dalam mendapatkan informasi terkait JFA dapat dilakukan melalui konsultasi *online* maupun *offline*. Apalagi sudah dikembangkan konsultasi JFA berbasis Artificial Intelligence (AURORA)

Target Output Tahun 2025

1000 Tiket Konsultasi



ENABLER
**PUSAT PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR**



Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina JFA, terdapat aspek yang tidak kalah penting yakni fungsi *enablers* yang mendukung operasionalisasi 4 (empat) peran pembinaan. Peran enabler, seperti sistem informasi memudahkan pelaksanaan peran pembinaan tersebut. Tak hanya itu, aspek manajemen kinerja, tata kelola, pengembangan budaya kerja, kehumasan dan dukungan tata usaha memungkinkan Pusbin JFA dalam melaksanakan seluruh rencana kerja secara efektif dan optimal. Dalam melaksanakan peran enabler ini, Pusbin JFA memiliki fokus sebagai berikut:

FOKUS ENABLER PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR



Mempertahankan Capaian/Predikat WBBM

Pusbin JFA akan berfokus untuk dapat mempertahankan capaian/predikat WBBM dengan mengimplementasikan praktek-praktek tata kelola yang baik, pembangunan budaya kerja, dan transformasi dalam pemberian pelayanan JFA yang lebih baik serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi

Meningkatkan Implementasi Manajemen Risiko

Peningkatan fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.



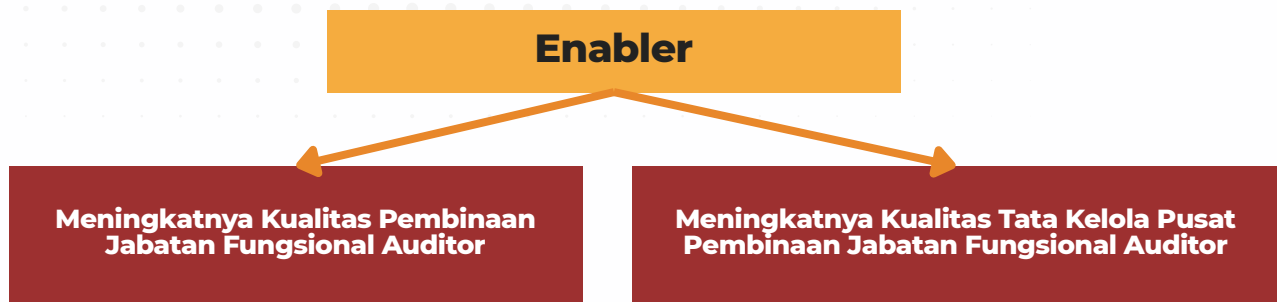
Peningkatan Media Informasi Pusbin JFA

Kehumasan yang dilakukan Pusbin JFA sebagai suatu kegiatan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan baik dengan *stakeholders*. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman, dukungan, dan citra positif Pusbin JFA.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pusbin JFA

Tata Kelola Pusbin JFA sebagai esensial untuk menjaga relevansi dan daya saing dalam dunia audit yang terus berubah. Peningkatan ini melibatkan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas kegiatan pengawasan.





A. Dukungan Enabler terhadap tercapainya Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Pelaksanaan peran *enabler* merupakan dukungan terhadap pencapaian kedua sasaran kinerja Pusbin JFA. Sasaran pertama yang didukung oleh peran *enabler* yaitu “Meningkatnya Kualitas Pembinaan JFA” melalui sistem informasi yang mumpuni. Dukungan sistem informasi diperlukan untuk mengaktivasi atas seluruh kegiatan Pembinaan Pusbin JFA agar terlaksana dengan efektif, cepat, dan efisien. Selain itu, dukungan sistem informasi juga diperlukan untuk membantu mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Uraian atas kegiatan pengelolaan sistem informasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN KINERJA				
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor				
INDIKATOR KINERJA OUTCOME				
Persentase APIP dengan JFA cukup secara kualitas				
PELAKSANAAN PERAN				
Enabler Pusbin JFA				
INDIKATOR KINERJA OUTPUT		SATUAN		JUMLAH
Analisis dan Visualisasi Data JFA		Laporan		12
Pengembangan Aplikasi JFA	Laporan		12	
	Aplikasi		5	

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk melaksanakan peran enabler dalam mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembinaan JFA,” Pusbin JFA telah melakukan kegiatan terkait dengan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi. Kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Analisis dan Visualisasi Data JFA

Masih banyaknya auditor yang belum melakukan update data terbaru sehingga Informasi melalui SIBIJAK belum dapat menggambarkan kondisi yang aktual yang dapat menimbulkan risiko Informasi pada SIBIJAK kurang tepat sehingga perlu dilakukan analisis dan pembaharuan data Auditor.



Target Output Tahun 2025

12 Laporan

Pengembangan Aplikasi JFA



Pengembangan aplikasi JFA bertujuan menyediakan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Pengembangan juga dilakukan untuk menghindari risiko ketertinggalan (*out of date*) teknologi yang digunakan serta menjaga aplikasi dari kerentanan celah keamanan.

Target Output Tahun 2025

12 Laporan

5 Aplikasi

B. Dukungan Enabler terhadap Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Selain pengembangan sistem informasi, peran *enabler* juga dilakukan melalui dukungan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor”. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan indikator kinerja output dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN KINERJA		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		
INDIKATOR KINERJA OUTCOME		
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	
Nilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Satker	Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja
PELAKSANAAN PERAN		
Enabler Pusbin JFA		
INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	JUMLAH
Pengelolaan kinerja Pusbin JFA	Laporan	1
Pengelolaan SAKIP	Skor	85,72
Pembangunan ZI di Pusbin JFA	Skor	85
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persentase	70
Program pembinaan JFA	Laporan	1
Laporan Pembinaan JFA	Laporan	1
Sintesis Hasil Pembinaan JFA	Laporan	1
Koordinasi KF-1 Pembinaan JFA	Laporan	2
Kehumasan Pusbin JFA	Laporan	4
Rakernis Pembinaan JFA	Laporan	1
Skor IKPA Pusbin JFA	Skor	95
Nilai Pengelolaan BMN Pusbin JFA	Skor	90
Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Predikat	Efektif
Penyusunan Laporan PP 39	Laporan	1

Pengelolaan Kinerja Pusbin JFA

Pengelolaan kinerja di Pusbin JFA adalah suatu proses yang terus-menerus dan dinamis. Proses ini memerlukan adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal organisasi yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Pengelolaan SAKIP



Pengembangan berkelanjutan proses bisnis dan tata kelola pembinaan JFA penting untuk menjaga relevansi dan daya saing dalam dunia audit yang terus berkembang. Hal ini juga dapat mendukung profesionalisme dan keberlanjutan fungsi audit di dalam organisasi. Pengembangan ini melibatkan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas kegiatan pengawasan.

Target Output Tahun 2025

85,72 Skor

Pembangunan ZI di Pusbin JFA

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan sarana penegakan integritas dalam menuju WBK/WBBM dan mendukung program reformasi birokrasi yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Target Output Tahun 2025

85 Skor





Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)

Penilaian terhadap efektivitas SPIP Unit Kerja dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian SPIP yang dilakukan unit kerja telah dilakukan secara efektif.

Target Output Tahun 2025

70 Persentase

Program Pembinaan JFA

Program Pembinaan JFA bertujuan menjamin pengembangan karier JFA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program ini juga bertujuan menjamin kualitas layanan pembinaan JFA secara berkelanjutan.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Laporan Pembinaan JFA

Laporan Pembinaan JFA adalah bentuk akuntabilitas Pusbin JFA dalam menjalankan program pembinaan JFA. Laporan ini memuat berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Pusbin JFA sebagai Pembina APIP.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan



Sintesis Hasil Pembinaan JFA

Sintesis Hasil Pembinaan JFA merupakan bentuk akuntabilitas dari hasil program pembinaan JFA yang telah dilakukan oleh Pusbin JFA.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan

Koordinasi KF-1 Pembinaan JFA

Koordinasi dengan Perwakilan BPKP terkait dengan pembinaan JFA pada Unit APIP yang ada di lingkungan Perwakilan BPKP.

Target Output Tahun 2025

2 Laporan



Rakernis Pembinaan JFA



Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembinaan JFA bertujuan untuk menyamakan persepsi pembinaan JFA untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme auditor. Dengan begitu, BPKP dapat lebih mengoptimalkan perannya sebagai Pembina JFA.

Target Output Tahun 2025

1 Laporan

Kehumasan Pusbin JFA

Kehumasan Pusbin JFA adalah kegiatan membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman, dukungan, dan membentuk citra positif Pusbin JFA. Kehumasan menjadi kunci strategis untuk menjaga hubungan baik dengan publik yang menjadi faktor krusial dalam kesuksesan dan keberlanjutan sebuah entitas.



Target Output Tahun 2025

4 Laporan

Nilai Pengelolaan BMN Pusbin JFA



Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bertujuan agar pemanfaatan BMN sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penilaian pengelolaan BMN dilakukan oleh Pusbin JFA sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan BMN dalam menjalankan program pembinaan JFA.

Target Output Tahun 2025

90 Skor

Skor IKPA Pusbin JFA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari instansi pemerintah. Penilaian ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja Pusbin JFA dalam melaksanakan tugas pembinaan JFA.



Target Output Tahun 2025

95 Skor

Laporan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan

Penyusunan Laporan atas Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Pelaporan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat



Target Output Tahun 2025

Efektif Predikat

Penyusunan Laporan PP 39



Penyusunan Laporan PP 39 Tahun 2006 (atau lebih tepatnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006) adalah tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan PP 39 Pusbin JFA ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya pada Pusbin JFA

Target Output Tahun 2025

1 Laporan

Lampiran I

PROGRAM KERJA PEMBINAAN JFA TAHUN 2025

No	Peran/Kegiatan	Target Output						PIC	Anggaran	Risiko	Strategi/Rencana Aksi
		2025	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4				
A	PERUMUSAN STRATEGI DAN EVALUASI PEMBINAAN JFA										
1	Penyusunan Regulasi/Kebijakan JFA	8	Peraturan/ draf peraturan	2	2	2	2	1.1	567.915.000	Ketidak cukupan anggaran untuk menyelesaikan kegiatan hingga terbitnya regulasi	Berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk tambahan anggaran penyusunan regulasi
2	Sosialisasi JFA	6	Laporan	2	2	1	1	1.1	142.085.000	Kegiatan sosialisasi tidak sesuai dengan jadwal dan target jumlah APIP yang ditetapkan	1. Koordinasi dengan APIP 2. Melaksanakan Diklat ToT dan PPM/PSK
3	Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern	1	Laporan		1			1.1	200.000.000	Pembinaan JFA yang dilaksanakan sudah tidak relevan dengan kondisi terkini (perubahan regulasi)	1. Kajian akademik GD, 2. Exposure draft kebijakan dengan unit lainnya, 3 Sosialisasi draft GD, 4. Penyusunan Model Kapabilitas Pengawasan APIP
4	Evaluasi Penerapan JFA	4	Laporan	1	1	1	1	1.2	200.000.000	1. Kesulitan memperoleh data. 2. Hasil evaluasi bersifat parsial dan belum dapat dijadikan rekomendasi strategis	1. Berkoordinasi dengan APIP yang dievaluasi, 2. Identifikasi isu yang spesifik dan strategis, 3. Implementasi MPP untuk penjaminan kualitas
5	Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	2	Laporan		1		1	1.2		Penyusunan laporan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi tidak tepat waktu	SOP Monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi
6	Monitoring Tindakanjutt Rekomendasi strategis	2	Laporan		1		1	1.2	54.000.000	Penyusunan laporan monitoring Tindakanjutt Rekomendasi strategis tidak tepat waktu	SOP Monitoring Tindakanjutt Rekomendasi strategis
7	Rekomendasi Pembinaan JFA	4	Laporan	1	1	1	1	1.2		Unit APIP belum melaksanakan tindak lanjut atas hasil pembinaan pengelolaan JFA	1, Penyusunan SOP pemantauan TL, 2. Intensifikasi komunikasi dan koordinasi
B	PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JFA										
1	Menyusun Analisis Potensi Pelaksanaan Uji Kompetensi	2	Laporan		1		1	2.1 & 2.2	90.076.000	Hasil pelaksanaan uji kompetensi tidak sesuai dan optimal	Pemetaan kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan fungsional serta koordinasi dengan Tim Pengembang Kompetensi

No	Peran/Kegiatan	Target Output						PIC	Anggaran	Risiko	Strategi/Rencana Aksi
		2025	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4				
2	Pengembangan Perangkat Uji Kompetensi Jenjang Auditor Madya, Utama	2	Paket soal	1	1			2.1		1. Proses pelatihan kompetensi lintas tidak dapat dilaksanakan, 2. Meningkatkan kompetensi lintas auditor BPKP tidak terukur	1. Menyusun peraturan terkait kompetensi lintas auditor BPKP 2. Penyusunan Jadwal Rapat dengan Tim Lintas Pengembang Kompetensi Auditor
3	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Auditor Madya, Utama	500 50%	Jml Peserta Ujikom & USABK % ketepatan waktu penerbitan sertifikat					2.1	694.365.000	Pelaksanaan Uji kompetensi belum dapat dilaksanakan secara optimal	1. Finalisasi dan penerbitan pedoman dan SOP operasional penyelenggaraan uji kompetensi, 2. Sosialisasi kegiatan dan aturan terkait uji kompetensi, 3. Melakukan piloting uji kompetensi
4	Pelaksanaan Uji Kompetensi CGCAE	200	jumlah peserta CGCAE					2.1	41.194.000	Pelaksanaan ujian tidak tepat waktu	Penjadwalan ujian secara berkala
5	Pengembangan Perangkat Uji Kompetensi Jenjang Auditor Pertama, Muda	3	Paket soal	1	1	1		2.2		1. Proses pelatihan kompetensi lintas tidak dapat dilaksanakan, 2. Meningkatkan kompetensi lintas auditor BPKP tidak terukur	1. Menyusun peraturan terkait kompetensi lintas auditor BPKP 2. Penyusunan Jadwal Rapat dengan Tim Lintas Pengembang Kompetensi Auditor
6	Pelaksanaan Uji Kompetensi Jenjang Auditor Pertama, Muda	2000 50%	jumlah peserta ujikom & USABK % ketepatan waktu penerbitan sertifikat					2.2	694.365.000	Pelaksanaan Uji kompetensi belum dapat dilaksanakan secara optimal	1. Finalisasi dan penerbitan pedoman dan SOP operasional penyelenggaraan uji kompetensi, 2. Sosialisasi kegiatan dan aturan terkait uji kompetensi, 3. Melakukan piloting uji kompetensi
C PEMBINAAN PROFESI AUDIT INTERN											
1	Fasilitasi Organisasi Profesi JFA	4	Laporan	1	1	1	1	3.2	174.180.000	Program kerja AAPI bagi auditor intern pemerintah tidak berjalan	Pengusulan struktur dengan proporsi yang seimbang antara Pimpinan dan Auditor, 2. Pertemuan berkala untuk pemantauan proker
3	Pengisian konten ELMS	1	Laporan			1		3.2		Konten yang disajikan tidak menarik	Penunjukan Petugas/satgas Reputasi Pusbin JFA
4	Koordinasi Pelaksanaan TSE	1	Laporan		1			3.2		Penyusunan Laporan TSE terlambat disampaikan	Pembentukan Tim materi dlm penyelesaian Laporan TSE
5	Bimtek Pengelolaan JFA	10	Laporan	3	3	2	2	3.2	150.000.000	Belum ada keseragaman APIP dalam mengelola JFA	1. Berkoordinasi dg Perwakilan BPKP untuk pelaksanaan Bimtek Pengelolaan JFA di APIP, 2. Penyusunan kriteria dalam penentuan APIP untuk dilaksanakan Bimtek JFA

No	Peran/Kegiatan	Target Output						PIC	Anggaran	Risiko	Strategi/Rencana Aksi
		2025	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4				
6	Forum Komunikasi Pembinaan JFA	1	Laporan			1		3.2	50.000.000	Jika isu-isu yang ada tidak ditangani dengan benar, maka karier auditor akan terhambat dan hal ini akan berpengaruh pada kinerjanya	Melaksanakan Forum Komunikasi Pembinaan JFA per regional wilayah secara rutin agar tercipta keterikatan
D FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR											
1	Layanan verval formasi JFA	300	orang	75	75	75	75	3.1	199.848.000	Keterlambatan pemrosesan dan penetapan hasil validasi dan verifikasi usulan formasi JFA	Penambahan fitur unggah dokumen hasil penetapan formasi Auditor dari Men PANRB pada SIBIJAK
2	Layanan pengangkatan ke dalam JFA	500	Orang	125	125	125	125	3.1		Keterlambatan pemrosesan dan penetapan hasil validasi dan verifikasi usulan pengangkatan ke dalam JFA	Memberikan informasi secara aktif kepada stakeholder dan perbaikan aplikasi SIBIJAK
3	Monitoring pengangkatan ke dalam JFA	1	Laporan nasional				1	3.1		Penyusunan laporan monitoring pengangkatan ke dalam JFA tidak tepat waktu	Banyaknya data dalam laporan mengharuskan laporan tidak disusun sekaligus namun dapat perperiode
4	Koordinasi pembinaan karier JFA	2	Laporan semester		1		1	3.1	63.360.000	Perbedaan persepsi dalam pengelolaan kepegawaian (pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan)	Memfasilitasi pertemuan antara APIP, BKN dan Pusbin JFA untuk menyamakan persepsi
5	Layanan konsultasi JFA	1000	jumlah tiket konsultasi	250	250	250	250	3.1	103.152.000	1. Stakeholder tidak memperoleh informasi yang tepat, 2. Kurang nyamannya pengguna layanan akibat ruang layanan tidak memadai	Pembaharuan sumber data secara berkala, 2. Mengusulkan kembali permintaan sarana ruangan yang memadai dan nyaman untuk pelayanan konsultasi tatap muka
D ENABLER PUSAT PEMBINAAN JFA											
1	Pengembangan Aplikasi JFA	12 5	Laporan Aplikasi	3	3	3	3	4.1	290.494.000	1. Teknologi yang digunakan selama ini sudah out of date sehingga rentan terhadap celah keamanan, 2. Informasi pada SIBIJAK kurang tepat	1. Menganalisa kebutuhan substansi layanan agar tim dapat menyediakan sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder, 2. Menyampaikan surat pemberitahuan updating data auditor kepada seluruh APIP

No	Peran/Kegiatan	Target Output						PIC	Anggaran	Risiko	Strategi/Rencana Aksi
		2025	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4				
2	Analisis dan Visualisasi data JFA	12	Laporan	3	3	3	3	4.1	151.382.000	Informasi yang diberikan melalui SIBIJAK, baik kepada stakeholder maupun pemangku kepentingan belum dapat menggambarkan kondisi yang aktual	1. Menyampaikan surat pemberitahuan updating data auditor kepada seluruh APIP, 2. Sosialisasi terkait keperluan updating data auditor pada SIBIJAK
3	Pengelolaan Kinerja Pusbin JFA	1	Laporan					4.2	196.000.000	Informasi pengelolaan kinerja terlambat diupdate dan tidak akurat	1. Merumuskan informasi dokumen/laporan pengelolaan kinerja yang akurat, 2. Pembahasan antar bidang pengelolaan kinerja di lingkungan pusbin JFA
4	Pengelolaan SAKIP	85,72	skor					4.2		Keterlambatan Penyusunan LAKIP	Pembentukan Pokja SAKIP
5	Pembangunan ZI di Pusbin JFA	85	skor					4.2		Motivasi, konsistensi dan komitmen pembangunan Zona Integrasi mengendur setelah pemerolehan WBBM tahun 2021	1. Mengaktifkan kembali Satgas ZI, 2. mengefektifkan Satgas ZI dan rencana kerja serta memantau implementasinya
6	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	80	skor					4.2		Menurunnya reputasi Pusbin JFA	1. Koordinasi penyediaan sapras konsultasi, 2. Memberikan reward, 3. Pengampu produk aktif menginformasikan kepada petugas kehumasan/website.
7	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	70	persentase					4.2		SPIP dan MR belum terinternalisasi dan terintegrasi dalam proses bisnis Pusbin JFA	1. Membangun kultur budaya, internalisasi dan sosialisasi SPIP dan MR, 2. Rapat MR pemilik, pengelola dan agen risiko
8	Program pembinaan JFA	1	Laporan				1	4.2		Keterlambatan sumber data dan validitas data dari seluruh subbidang	1. Menyusun format isian materi subbidang, 2. Melakukan koordinasi dan menugaskan LO pemangku data dari seluruh bidang
9	Sintesis hasil pembinaan JFA	1	Laporan				1	4.2		1. Data pembinaan JFA yang akan dianalisis kurang akurat dan terlambat/tidak diperoleh, 2. Hasil sintesis belum mampu menjawab isu utama dan strategis yang hendak disasar	1. Perumusan rencana kerja untuk menghasilkan informasi valid, strategis dan berdampak, 2. Implementasi proses bisnis dan MPP pada penyusunan sintesis

No	Peran/Kegiatan	Target Output						PIC	Anggaran	Risiko	Strategi/Rencana Aksi
		2025	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4				
10	Koordinasi KF-1 Pembinaan JFA	2	Laporan		1		1	4.2		1. Perwakilan tidak melaksanakan item kegiatan pembinaan JFA yang telah ditentukan, 2. Perwakilan tidak melakukan koordinasi atas perubahan pelaksanaan KF-1	1. Melakukan koordinasi berkala melalui WAG dengan seluruh Korwas P3APIP, 2. Melibatkan peran aktif Perwakilan BPKP dalam kegiatan pembinaan JFA
11	Kehumasan Pusbin JFA	4	Laporan	1	1	1	1	4.2	150.000.000	1. Reputasi Pusbin JFA belum optimal di lingkungan stakeholder, 2. Stakeholder Pusbin JFA tidak terinformasikan kegiatan pembinaan JFA yang telah dilakukan	1. Menyusun rumusan kegiatan kehumasan, 2. Internalisasi promosi dan strategi komunikasi, 3. Koordinasi informasi yang akan disajikan, 4. Workshop Strategi Branding
12	Rakemis Pembinaan JFA	1	Laporan		1			TU	365.084.000	Rapat kerja teknis belum optimal dalam menggali isu strategis dan merumuskan langkah kerja operasional	Perumusan tema, strategi dan langkah kerja yang efektif
13	Skor IKPA Pusbin JFA	95	Skor					TU		1. Pemblokiran DIPA, 2. Kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal	1. Pengendalian revisi DIPA pagu, 2. Optimalisasi penggunaan UP dan TUP; Monitoring pelaksanaan anggaran belanja, 4. Optimalisasi perencanaan kegiatan
14	Nilai Pengelolaan BMN Pusbin JFA	90	Skor					TU		1. Inkurasi pelaporan BMN, 2. Penyalahgunaan BMN	1. Pencatatan reguler, 2. Koordinasi seluruh koordinator dalam monitoring pengelolaan BMN
15	laporan PIPK (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan)	Efektif	Predikat					TU		Terlambatnya penyusunan Laporan PPIK	Pengendalian penyusunan Laporan oleh Atasan Langsung
16	Penyusunan Laporan PP39	1	Laporan				1	TU		Terlambatnya penyusunan Laporan PP39	Pengendalian penyusunan Laporan oleh Atasan Langsung
Total									4,577,500,000		



PUSBIN JFA
MOTIVATING • UNITING • DEVELOPING • ACHIEVING